

**SIARAN PERS****Otorita Ibu Kota Nusantara**

Nomor: 053/sipers/humas-oikn/02/2024

21 Februari 2024

Otorita IKN Akan Soft Launching VLR SDGs Nusantara di Forum PBB

BANGKOK - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono melakukan soft launching Evaluasi Sukarela Sustainable Development Goals (SDGs) di Tingkat Lokal atau *Voluntary Local Review* (VLR) Nusantara, pada Kamis (22/02/2024), di sela acara Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) Ke-11, sebuah forum yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) pada 20-23 Februari 2024 di Bangkok, Thailand. APFSD merupakan forum tahunan dalam rangka tindak lanjut dan peninjauan (*review*) kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

"InsyaAllah kita lakukan soft launch VLR Nusantara, ini adalah *the first in the world untuk the new capital city* yang melakukan *review* awal keselarasan perencanaan pembangunan dengan SDGs. VLR IKN menguraikan bagaimana perencanaan dan strategi pembangunan di IKN baik infrastruktur maupun non infrastruktur, telah selaras dengan agenda 2030. Selain itu SDGs juga dimanfaatkan sebagai kerangka untuk mendiskusikan inovasi dan tantangan berkelanjutan dari ibu kota Nusantara. Berbeda dengan VLR dari berbagai daerah lainnya di dunia, VLR IKN juga melakukan analisis *ex-ante* dampak keberadaan IKN terhadap capaian SDGs wilayah dimana IKN berada yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur sampai tahun 2030. Ditambahkan oleh Bambang bahwa OIKN baru pertama menyusun VLR, namun harapannya, menjadi VLR yang memberikan *impact* bagi akselerasi SDGs di IKN dan nasional" ucap Kepala Otorita IKN, Rabu (21/02/2024).

Dokumen VLR SDGs Nusantara ini disusun dengan melibatkan para pihak baik pemerintah dan nonpemerintah serta mendapat dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia dan mitra pembangunan cq. UNESCAP, UNRCO di Indonesia, UNDP, dan ADB.

Dalam intervensi negara yang disampaikan Bambang selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia pada APFSD ke-11 ini, Bambang menyampaikan pentingnya melokalisasi program SDGs sampai ke tingkat desa. "Dengan melokalisasi SDGs, kami tidak hanya menyinkronkan agenda global dan nasional, namun kami juga memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan *bottom-up*," katanya.

Selain itu, Kepala Otorita juga menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam pencapaian SDGs. "SDGs hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif, termasuk pemerintah dan semua aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Kami belajar bahwa mendorong kerja sama multipihak tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus disusun secara strategis," ungkapnya.

Inisiasi VLR SDGs Nusantara Ini banyak diapresiasi dunia, karena berbeda dari kebanyakan kota yang memiliki VLR ketika kota sudah terbangun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Armida Salsiah Alisjahbana selaku Under-Secretary General untuk PBB dan ESCAP Executive Secretary, "kami senang bisa bekerja sama dengan OIKN untuk penyusunan VLR ini. Khusus VLR Nusantara berbeda karena biasanya VLR kota-kota pada umumnya semacam evaluation of assessment yang sifatnya *ex-post*, untuk Nusantara berbeda karena kotanya belum ada, baru dibangun." ungkapnya.



NUSANTARA

SIARAN PERS

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Kontak:

halo@ikn.go.id / humas@ikn.go.id

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : [IKN Indonesia](https://www.youtube.com/IKN Indonesia)

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara



